

KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Oleh:

Ritman Hendra¹, Fadriati²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
SUMATERA BARAT- INDONESIA

¹Email: ritman.mpi2021@gmail.com

²Email: fadriati@iainbatusangkar.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the decentralization of education, which at first was fully controlled by the central government. With the decentralization of education, local governments have the authority to regulate and control education in their regions in an effort to improve the quality of education. This study uses a qualitative approach with the type of literature study. Data collected from various journal articles and books that are in accordance with the research topic through content analysis. This type of research is a qualitative research. The results of this study show that the decentralization of education is actually fully implemented by the local government, so that the impact can be felt by the school community in an effort to improve the quality of education.

ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang desentralisasi pendidikan yang pada awalnya sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan pendidikan di daerahnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai artikel jurnal dan buku yang sesuai dengan topik penelitian melalui analisis isi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan sebenarnya dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh warga sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Keywords: *Policy, Education Decentralization, Education Quality*

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi pendidikan dikenal dengan otonomi pendidikan pada dasarnya sudah maksimal mengawal, membentuk dan optimal dalam peningkatan mutu pendidikan. Tapi pada kenyataannya masih saja kendala dan problematika yang dirasakan oleh tingkat satuan pendidikan di daerah, di tambah lagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju begitu cepat, menyebabkan adanya pergeseran yang terjadi pada dunia pendidikan. Bergeser dalam menggunakan pola-pola lama menuju pola-pola baru, yang bertujuan mempercepat meningkatkan mutu pendidikan, teknologi dimanfaatkan untuk proses meningkatkan mutu, realitanya sebagian besar sumber daya manusia kurang cakap dalam mengoperasikan teknologi itu, tidak hanya itu susahnyanya sumber daya pendidik memahami pola itu, ada lagi tidak meratanya sarana prasarana teknologi yang ada di lembaga pendidikan itu, beragamnya problema yang dihadapi lembaga sekolah. Otonomi pendidikan itu juga harus didukung dari pemasukan asli daerah, semakin besar pemasukan daerah, maka semua kegiatan akan bias dilaksanakan, termasuk aspek pendidikan. Bergeser boleh saja saja terjadi dalam cara dan gaya yang dilakukan dalam setiap kebijakan, tapi tidak boleh keluar dari bingkai aturan-aturan dan undang-undang dasar 1945 serta peraturan lain yang mengikat. Seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (*Hadi et al.*, 2016). Pada Pasal 31 Ayat 1, tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. Pasal ini menjadi poin penting bagi pemerintah, bahwa setiap warga Negara wajib melaksanakan pendidikan, dan segala pembiayaan yang dikeluarkan dari pengajaran itu, pemerintah yang membiayainya.

Pendidikan pada dasarnya adalah upaya dalam meningkatkan martabat dan jati diri bangsa terhadap seluruh umat manusia, tidak hanya skala nasional, tapi skala internasional. Pendidikan yang bermutu akan mencerminkan masyarakat maju. Dalam konteks lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat bernilai dan sangat penting. Proses pendidikan yang ada pada setiap lembaga pendidikan sejatinya adalah bagaimana mengantarkan peserta didik untuk menjadi warga Negara yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai luhur yang ada

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Sistem Pendidikan Nasional dalam berinteraksi pada lingkungan masyarakat secara baik dan tepat. (*Istiq'faroh*, 2020)

Adanya desentralisasi pada aspek pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bertujuan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memajukan pendidikan di daerah sesuai amanat undang-undang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa pembangunan pendidikan dioptimalkan di daerah. Peran Walikota dan Bupati diharapkan lebih serius dalam mengimplementasikan otonomi pendidikan, dengan mengacu kepada empat alasan pokok dalam membuat kebijakan pendidikan, yaitu: 1). Peningkatan mutu, 2). Efisiensi keuangan, 3). Efisiensi administrasi, 4). Perluasan atau perawatan. (*Maisyannah*, 2018)

Desentralisasi pendidikan yang diprogramkan pemerintah, kadang kala menemukan problematika di daerah, salah satunya terkait dengan visi dan misi walikota atau bupati yang ada di daerah, sehingga otonomi pendidikan yang sejatinya menjadi suatu prioritas dalam memajukan pendidikan di daerah menjadi terkendala. Misalnya: kepala daerah yang dalam visi dan misinya tentang meimplementasikan pembangunan infrastruktur, mereka cenderung konsen pada hal itu, sehingga abai dari kebijakan otonomi pendidikan yang sesungguhnya membantu pemerintah pusat mencapai suatu tujuan pendidikan secara nasional. Permasalahan ini sering terjadi pada kalangan Bupati dan Walikota. Sebenarnya apapun visi dan misi yang dituangkan dalam satu set program lima tahun kepemimpinannya, maka pendidikan tidak bisa lepas dari program itu, karena itu kebijakan otonomi pendidikan yang sudah dibuat dengan sederet penelitian dalam usaha mencerdaskan anak-anak bangsa. Bahwa pendidikan itu lambang bagi kemajuan dan kelanggengan suatu bangsa, melalui pendidikan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, mampu menggali potensi-potensi generasi-generasi, agar tercapainya tujuan pendidikan nasional.

B. METODE

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, melalui pendekatan studi pustaka, dengan teknik pengumpulan data adalah dengan mengambil beberapa jurnal dan buku yang sesuai dengan topik pembahasan. Dalam pengambilan data dari jurnal dan buku berdasarkan

deskriptif analisis, dengan cara mengemukakan data-data dan dokumen yang ditemukan dari berbagai jurnal maupun buku-buku terkait, lalu dikembangkan kajian tersebut menjadi sebuah narasi, selanjutnya pada bagian terakhir di ambil sebuah kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan isu strategis yang sangat dekat dan erat hubungan dengan masyarakat. Hal ini sekaitan dengan bergulirnya reformasi, tidak sedikit memberikan dampak terhadap pendidikan yang ada di Indonesia, di tambah lagi adanya otonomi pendidikan, sebelumnya tersentralistik cenderung agak tertutup, dengan adanya otonomi lebih terbuka. (*Fatkhuri, 2019*). Bahwa pemerintah daerah turut andil dalam mengambil kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kebijakan pendidikan dengan adanya otonomi daerah Indonesia telah banyak membuat dan menerbitkan kebijakan dari masa ke masa pemerintahannya, ini dapat dilihat dan ditandai dengan silih bergantinya pemangku kebijakan yaitu Presiden dan Menteri, maka secara otomatis berganti pula suatu kebijakan. Dalam hal ini dapat dijadikan contoh pada bidang pendidikan, bahwa sebagai pendukung tugas Kemendikbud di bidang analisis dan sinkronisasi kebijakan adalah PASKA (*Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan*), kebijakan ini di atur dalam Permendikbud Nomor 766 Nomor 11 Tahun 2018, yang berbunyi: bahwa PASKA melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian, serta pemantauan dan evaluasi target rencana Kementerian (*Permana Octofrezi, 2020*). Digulirkannya otonomi pendidikan menjadi terobosan baru pada dunia pendidikan, bahwa daerah memiliki gaya dan metodologi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keperbedaan suku, ras dan agama serta kearifan local menjadi cikal bakal mempertahankan kebhinekaan pada aspek pendidikan. Desentralisasi pendidikan membuahkan paradigm baru dalam mewujudkan pendidikan yang bermartabat sesuai kekhasan daerah masing-masing.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa Kebijakan pendidikan Indonesia mulai dari pra kemerdekaan sampai saat ini tidak terlepas dari kondisi siasal dan politik yang melingkupinya. Bisa dibaca dari pemerintah kolonial Belanda berkuasa, orde lama, orde baru, reformasi dan pasca reformasi penuh

dengan dinamika yang cukup menarik pada setiap perodesasinya. Hal yang menarik, bahwa setiap pergantian periode menunjukkan kualitas pendidikan mengalami peningkatan dan perubahan. Penyempurnaan demi penyempurnaan tetap dilakukan, agar pendidikan tetap berkualitas dan terjaga. (*Maghfuri Amin*, 2020) Usaha itu dilakukan walaupun ada saja keterbatasan, keterbatasan itu adalah hal yang biasa, karena yang melakukannya makhluk yang bernama manusia, makhluk yang bernama manusia itu tidak terlepas dari kudrat kemanusiaan. Manusia memiliki keterbatasan dalam melakukan sesuatu, yang Maha sempurna hanyalah Allah yang empunya langit dan bumi beserta isinya. Apabila desentralisasi pendidikan dilakukan dengan baik, terukur dan sistematis, maka mutu dari kebijakan itu akan tercapai, jika sebaliknya, maka akan menimbulkan kekacauan dan cenderung thabiat manusia ini suka menyalahkan. Agar ini tidak bias kepada hal itu, walikota/bupati berperan dengan serius untuk memajukan pendidikan di daerahnya dengan melibatkan sumber daya manusia yang kompeten dengan didukung dengan anggaran yang akan mampu mewujudkan mutu dari masing-masing lembaga pendidikan, sehingga pada akhirnya tujuan dari pendidikan nasional tercapai.

Desentralisasi (otonomi) pendidikan dalam Analisis Kebijakan Pendidikan perlu memperhatikan dua hal pokok berkaitan pendidikan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pendidikan itu adalah 1). Pendidikan hak bagi seluruh bangsa, artinya tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tidak berpendidikan, tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tidak pandai membaca dan menulis, tidak ada lagi rakyat Indonesia di injak-injak oleh Negara lain karean lemahnya pendidikan, adanya kebijakan otonomi pendidikan yang sudah lama berlangsung ini, menjadi bangsa Indonesia sejajar dengan Negara lain di Dunia, bahkan Negara Indonesia bias dijadikan tempat bagi orang-orang belajar dan menimba ilmu. 2). Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya: cerdas akal nya, cerdas hatinya dan cerdas dalam melaksanakan. Menjadi penting memperhatikan ini dalam menganalisis kebijakan pendidikan untuk perbaikan pendidikan itu sendiri. (*Imam Rohani*, 2020). Adanya otonomi daerah menjadi ruang bagi semua kepala daerah mengekspresikan kebijakannya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Berbicara terkait dampak globalisasi dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, maka terjadinya arus globalisasi menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat dalam merubah pemikiran seseorang dalam mencapai sesuatu yang dituju dalam aspek pendidikan (*Nahak., 2019*). Pendidikan dengan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah mendapatkan pengaruh dari globalisasi, globalisasi biasa ditrejemahkan suatu proses perubahan yang terjadi pada tatanan masyarakat, tanpa mengenal batas wilayah dan memiliki dua dimensi ruang dan waktu (*Saodah et al., 2020*). sehingga tatanan masyarakat mengikuti proses itu dengan sederet pertimbangan dan kebijakan yang mampu memberikan pengaruh terhadap semua lini, termasuk pendidikan. Karena pada hakekatnya arus globalisasi tidak bisa dihindari, setiap orang ikut dengannya dengan membuat standar-standar kebijakan, pada gilirannya arus globalisasi berdanpak positif, khususnya terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia.

Globalisasi memiliki dampak baik Positif dan Negatif, tergantung dari orang yang menggunakannya atau memanfaatkannya, di antara dampak positif globalisasi terhadap pendidikan Indonesia, sebagai berikut:

- a. Kemudahahan dalam mengakses Informasi salah satunya terkait Pendidikan.
Dampak positif globalisasi adalah mudahnya mengakses informasi pendidikan. Internet memberi kemudahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar,
- b. Meningkatkan kualitas pendidik (*tenaga pengajar*)
Dengan memaksimalkan teknologi dan informasi di era globalisasi, kualitas pengajar akan terus meningkat.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan
Akibat dari pesatnya arus globalisasi, metode pembelajaran yang awalnya bersifat sederhana kini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi
- d. Mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif
Perkembangan IPTEK pada era globalisasi bagi sebuah instansi pendidikan seyogyanya bisa dimanfaatkan untuk mendorong siswa-siswanya agar bisa menciptakan suatu karya yang inovatif. (*Saodah et al., 2020*)

Adapun dampak negatif dari globalisasi bidang pendidikan Indonesia, yaitu:

- a. Menurunnya kualitas moral (baik siswa atau pendidik)
Informasi dari internet yang dapat diakses secara mudah dapat mempengaruhi moral siswa atau pendidik. Banyak kita saksikan adanya pencabulan baik dilakukan siswa kepada siswa, ataupun guru kepada siswa, ini disebabkan sangat mudahnya mengakses situs-situs negatif yang ada dalam internet.
- b. Meningkatnya kesenjangan sosial
Kemajuan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan perlu diimbangi dengan kesiapan mental dan modal yang tidak sedikit, sehingga terjadi ketimpangan antara yang tinggal di kota dengan desa, apalagi Negara Indonesia masih tergolong Negara berkembang, tentu membutuhkan modal yang banyak, agar kesenjangan tidak terjadi.
- c. Tergerusnya kebudayaan lokal
Akibat adanya arus globalisasi ini, budaya di Indonesia dapat hilang seperti pudarnya rasa nasionalisme, berkurangnya sifat kekeluargaan, serta gaya hidup masyarakat yang kebarat-baratan. Padahal jati diri bangsa itu adalah mampu menjaga, melindungi dan melestarikan budaya sendiri.
- d. Munculnya tradisi serba cepat dan instan
Orientasi pendidikan yang awalnya menekankan pada proses berubah menjadi ranah pencapaian hasil. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang hanya menekankan pada hasil akhir ketika menempuh sebuah pendidikan, bahkan saat ini makin marak adanya jual beli ijazah palsu karena banyak orang yang ingin cepat mendapatkan keuntungan secara cepat dan instan. (Setyawati *et al.*, 2021)

Faktor yang melatarbelakangi Refomasi Pendidikan di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Pendidikan yang sentralistik
Adanya sentralistik-otoriter bidang pendidikan yang ada pada orde baru. Baru pada pemerintahan Bapak BJ. Habibie (*Alm*) menetapkan kebijakan otonomi daerah, termasuk otonomi dalam pendidikan. Di sini peran pemerintah daerah dimunculkan dan tidak tergantung dari pusat. (Syaharuddin & Susanto, 2019)

b. Memperbaiki sistem pendidikan

Prinsip dari reformasi adalah rasionalitas, percaya kepada kemajuan dan pengetahuan. Reformasi diberikan pengertian dengan perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada, untuk kebutuhan masa yang akan datang yang tujuannya untuk memperbaiki, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan segala macam penyimpangan dan praktek-praktek yang salah menuju prosedur-prosedur yang lebih baik, perubahan itu dilakukan menyeluruh, mulai dari aspek politik, hukum, ekonomi, sosial dan pendidikan. (*Setyawati et al.*, 2021). Salah satu contoh Reformasi sistem kurikulum pendidikan di Indonesia banyak dipengaruhi dari berbagai negara maju seperti Amerika, Finlandia, Jepang, Selandia Baru dan Singapura serta negara maju lainnya. (*Wahyudi & Lutfi*, 2019)

c. Rendahnya kualitas pendidikan

Kualitas pendidikan Indonesia sangat memprihatinkan, hal ini tercermin dari hasil studi membaca tingkat SD yang dilaksanakan oleh organisasi *International Educational Achievemets* (IEA), menunjukkan bahwa siswa SD berada peringkat 38 dari 39 Negara dan Tingkat SMP studi Matematika berada pada urutan 39 dari 42 Negara, dan studi IPA berada pada urutan 40 dari 42 Negara di dunia. (*Syakhriani et al.*, 2022). Pada penelitian PISA menunjukkan bahwa peringkat siswa Indonesia dari Literasi dan Matematika juga mengalami masalah, bahwa siswa Indonesia berada pada urutan ke 73 dari 78 Negara pada tahun 2018 studi letarasi, matematika dan sains. (*Masfufah & Afriansyah*, 2021).

Kebijakan manajemen berbasis sekolah Kualitas atau mutu pendidikan tujuan utama bagi pembangunan pendidikan nasional Indonesia.peningkatan mutu terus diupayakan terus meneus dalam proses pendidikan yang ada pada level lembaga pendidikan. Tercapainya mutu pendidikan tidak bisa dilepaskan dari manajemen berbasis sekolah dalam mengembangkan sumber manusia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. (*Baro'ah*, 2020)

Manajemen berbasis sekolah memberikan peluang kepada sekolah atau lembaga pendidikan untuk mandiri mengolah dan memberdayakan

sumber daya internal dan eksternal dalam mencapai mutu pendidikan yang diselenggarakan itu. (*Manu & Jusuf Blegur, 2017*). Pada hakikatnya Manajemen Berbasis Sekolah tidak boleh lepas dari kepemimpinan kepala Sekolah selaku manajer untuk membuat kebijakan dan memberikan instruksi kepada mitranya dalam lembaga pendidikan itu. Lahirnya Manajemen Berbasis Sekolah merupakan hasil dari reformasi. Kepala Sekolah memiliki peran otonom terhadap kinerja semua mitra, dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan supaya menunjukkan loyalitasnya dalam mengembangkan potensinya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Istilah manajemen berbasis sekolah pertama kali muncul di Amerika Serikat dengan sebutan “*school based manajement*”, adanya mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Program ini diberikan secara otonom kepada sekolah untuk dipelajari dan difungsikan dalam rangka mengelola sumber daya manusia dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai kebutuhan, serta tanggap terhadap kebutuhan setempat. Terlibatnya masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Setidaknya ada tujuh bidang garapan manajemen sekolah, yaitu:

- a. Manajemen kesiswaan atau peserta didik
Siswa bagian terpenting dari sebuah kebijakan, apalagi yang dibahas adalah pendidikan. Lembaga pendidikan perlu mengoptimalkan tugas dan fungsi wakil kesiswaan dalam menjalankan mutu pendidikan yang ada pada tingkat satuan pendidikan, kolaborasi antar komponen dapat menjadikan siswa-siswa lebih kreatif dan inovatif. Yang perlu dipahami secara baik, jangan ada lagi diskriminasi terhadap siswa, karena siswa disebut dalam kurikulum merdeka dengan sebutan pelajar yaitu seseorang yang butuh pengajaran dan menjadi orang terpelajar. Itu semua dibutuhkan manajemen siswa yang diolah oleh lembaga pendidikan untuk menjadi siswa yang berkualitas.
- b. Manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
Guru dan tenaga kependidikan bagian terpenting perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dari kebijakan yang dilakukan. Guru yang memiliki empat kompetensi paling dasar yaitu pedagogic, profesionalitas, social dan kepribadian akan mengantarkan siswa yang

berkualitas melalui memfungsikan secara tepat fungsi-fungsi manajemen.

- c. Manajemen kurikulum dan program pengajaran
Dalam meningkatkan mutu pendidikan yang menjadi jantungnya yang wajib diperhatikan adalah kurikulum dan program pengajaran.
- d. Manajemen keuangan atau pembiayaan
Unsur yang menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan mutu pendidikan, adanya pembiayaan yang jelas dan mengeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tepat dan terarah.
- e. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan
Baik dan layak nya sarana dan prasarana menjadi penentu ketercapaian sebuah pengajaran dan kurikulum yang dibuat. Ketercapaian itu adalah mampu mengantarkan pelajar menjadi berkualitas.
- f. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat
Masyarakat bagian terpenting pendukung akan kesuksesan mutu pendidikan, ada istilah yang sering muncul ditengah-tengah para pelaku pendidikan, bahwa ada tiga pilar dalam memantapkan dan menjadikan pendidikan itu berkualitas salah satunya adanya peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga mutu pendidikan itu.
- g. Manajemen layanan khusus.
Hal lain menjadi penentu akan meningkatkan mutu pendidikan, adanya kebijakan lembaga terhadap layanan yang diberikan kepada sumber daya manusia, ini pun berdasarkan undang-undang dan aturan yang berlaku (*Made Saihu, 2020*)

Indikator Keberhasilan dari manajemen berbasis sekolah terhimpun dalam poin-poin berikut:

- a. Efektivitas proses pembelajaran.
Proses yang tepat, jelas dan sistematis dapat meningkatkan mutu pendidikan. Efektif memiliki berdaya guna semua waktu-waktu yang telah dipakai dan dihabiskan oleh semua sumber daya manusia yang ada di lembaga pendidikan itu.
- b. Kepemimpinan sekolah yang kuat.

Top leader menjadi penentu akan keberhasilan sebuah mutu pendidikan. Jika pimpinannya lemah, maka tidak akan berhasil, jika sebaliknya, akan membuahkan keberhasilan yang gilang gemilang.

- c. Pengelolaan tenaga yang efektif.
Sumber daya perlu dikelola dengan baik, apakah melalui peningkatan kompetensi berkelanjutan seiring majunya ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Kepemilikan budaya mutu sekolah
Setiap individu yang tergabung dalam sekelompok orang pada lembaga pendidikan memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- e. Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas, dan dinamis
Lembaga pendidikan di dalamnya terhimpun sekelompok orang yang perlu memperhatikan tujuan mereka hadir pada lembaga tersebut tidak lain adalah menyumbangkan pemikiran, kekuatan dan potensi yang dimilikinya untuk memajukan pendidikan.
- f. Sekolah memiliki kemandirian.
Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan, tidak melulu menggantungkan semua kepada pihak lain, sehingga pendidikan tidak berjalan dengan baik, tapi mengerahkan seluruh potensi bagi masing-masing sumber daya yang ada untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- g. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat,
Keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan pendidikan adalah penting dilakukan oleh lembaga pendidikan.
- h. Transparansi sekolah.
Keterbukaan adalah kunci dari sebuah keberhasilan lembaga pendidikan.
- i. Sekolah memiliki kemampuan untuk mengubah dalam psikis dan fisik.
Keahlian dalam bidangnya masing dari semua komponen yang ada menjadi keberhasilan dari lembaga pendidikan.
- j. Responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan.
Cepat tanggap dan cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah, jika ada problematika. Ini bagian dalam keberhasilan lembaga pendidikan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan.

Kebijakan diterjemahkan dengan “policy” yang artinya mengurus masalah dan kepentingan umum yang titik tekannya bertujuan pada tindakan (*produk*). Apabila disanding dengan pendidikan, maka “*educational policy*” adalah hasil produk dari satuan atau orang yang terpilih, produk dari beberapa masukan, demi perbaikan mutu pendidikan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya adalah guru. Guru sangat memiliki peran besar terhadap peserta didik dan lembaga yang menaunginya terhadap kualitas sistem pendidikan. Apabila menemukan kinerja guru rendah, tentu akan berpengaruh kepada capaian pendidikan, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan, supaya mutu bagian dari tujuan pendidikan tercapai. (*Yani et al., 2020*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 terdapat empat kompetensi utama guru, yakni kompetensi (1) pedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, dan (4) profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Dengan demikian, manajemen kinerja merupakan pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampai keberhasilan secara berkelanjutan pada organisasi guna memperbaiki kinerja guru dengan mengembangkan kemampuan dari tim sejawat guru dan kontribusi guru sebagai individu.

Kinerja guru tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Faktor individu dari guru sendiri dimana guru harus meningkatkan diri dalam pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri dan motivasi kerja dalam menjalankan tugasnya.
- b. Faktor kualitas manajer dari kepemimpinan dalam memberikan arahan dan dorongan yang memotivasi guru untuk bekerja lebih giat dan semangat.
- c. Faktor tim kerja yang mendukung dan berkolaborasi dalam kerja guru yang turut membantu ketika guru menghadapi permasalahan dalam tugasnya.
- d. Pimpinan memperhatikan dan menyediakan fasilitas kerja guru, menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam organisasi sekolah.
- e. Faktor kontekstual berkaitan dengan adanya perubahan secara internal dan eksternal yang harus dicermati oleh guru. Kelima faktor

tersebut sangat mempengaruhi peningkatan kinerja guru yang lebih efektif dan produktif. (Hanim et al., 2020)

Dalam manajemen strategik terhadap pendidikan, hal yang mendasar menjadi perhatian adalah analisis SWOT analisis SWOT yaitu Strengths (*kekuatan*), Weaknesses (*kelemahan*), Opportunities (*peluang*), dan Threats (*ancaman*). Bahwa analisis SWOT sangat erat kaitannya dengan mutu pendidikan. Maka yang perlu direkonstruksi dalam pendidikan nasional adalah:

1. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan
2. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
3. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level kebijakan (pengambil keputusan) dan level operasional melalui komite sekolah. Peran komite meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja sekolah.
4. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan. (Isamuddin et al., 2021)

Adanya desentralisasi dalam bidang pendidikan yang sudah berjalan cukup lama, perlu penataan lebih baik lagi melalui kebijakan-kebijakan, sehingga lembaga pendidikan memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola pendidikan di sekolah. Lembaga sekolah dapat menjadikan suatu perubahan zaman menjadi suatu yang lebih berguna dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu di perlukan Manajemen dalam menyusun perencanaan pendidikan guna dapat meningkatkan mutu pendidikan supaya peserta didik dapat mampu menjadi bagian dari perubahan. Dalam manajemen terdapat manajemen strategik yang dari hal itulah lembaga sekolah dapat mampu mengetahui dan merencanakan strategik agar sekolah dapat tetap bertahan dan makin meningkatkan mutunya dikemudian hari.

Dengan adanya analisis SWOT maka sekolah mampu mengoptimalkan kekuatan untuk menutupi kelemahan serta mampu memanfaatkan peluang

untuk menghindari hambatan sehingga dapat merencanakan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dari hasil analisis SWOT itulah pula dapat mengetahui mutu suatu lembaga pendidikan.

D. KESIMPULAN

Terjadinya perubahan yang signifikan terhadap pendidikan yang awalnya sentralistik menuju desentralisasi, telah membawa perubahan besar terhadap sistem pendidikan nasional. Desentralisasi lebih dikenal dengan otonomi pendidikan, bahwa daerah diberikan peluang seluas-luasnya memajukan pendidikan. Program otonomi daerah digulirkan pada masa pemerintahan BJ. Habibie termasuk otonomi pendidikan. Walaupun masih baru pada masa itu, tapi tetap berpijak pada pondasi Undang-undang dasar 1945 dan sistem pendidikan nasional. Dengan berjalannya waktu, pendidikan dilakukan secara tradisional sesuai masa yang dihadapi, dengan masuknya era globalisasi, adanya pergeseran paradigma dalam input dan proses pendidikan yang terjadi pada lembaga pendidikan untuk mewujudkan cita-cita didirikan bangsa ini. Arus globalisasi tidak bisa dihambat oleh siapa saja, yang perlu adalah dimanfaatkan dengan baik perkembangan dan dinamika sosial ke arah yang positif serta berguna dalam memajukan pendidikan.

Pendidikan Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan, ini terlihat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, reformasi pendidikan adalah suatu kebutuhan mendasar. Mempercepat dan memperlancar proses pendidikan baik yang dilakukan oleh pemangku kebijakan maupun sekolah sebagai basis yang menyelenggarakan pendidikan. Reformasi pendidikan sangat dibutuhkan sebuah manajemen dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pembagian wewenang, pelaksanaan dan pengawasan, bagian terpenting untuk dilakukan oleh top manajer yang ada di sekolah, istilah itu biasa disebut dengan manajemen berbasis sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer tidak bisa bekerja sendiri, untuk menyelesaikan desentralisasi pendidikan, adanya guru-guru atau tenaga pendidik yang memiliki kompetensi memajukan pendidikan pada lembaga pendidikan.

Dengan demikian desentralisasi memberikan peluang terhadap daerah, khususnya lembaga pendidikan untuk berkreasi dan berinovasi, globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini tergantung dari penggunaan, jika digunakan pada hal baik, maka hasilnya juga akan baik, jika sebaliknya, maka akibatnya akan tidak baik. Semua keleluasaan yang diberikan pemerintah terhadap pendidikan, manfaatkan dengan baik dan positif demi menyukseskan pendidikan dan tercapai kualitas pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063–1073.
- Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 278–297. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.874>
- Hadi, H., Hafidhuddin, D., Husaini, A., & Endin Mujahidin. (2016). Kebijakan Pendidikan Nasional Terhadap Pendidikan Islam dan Pendidikan Sekuler. *Miqat*, XI(2), 390–409. <https://doi.org/10.2307/30107745>
- Hanim, Z., Sari, D. S., & Soe, R. (2020). Kebijakan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1), 43–60. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jmp/article/view/30672/13501>
- Imam Rohani. (2020). Kajian Kebijakan Pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 1(01), 80–99. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v1i01.33>
- Isamuddin, I., Faisal, F., Maisah, M., Hakim, L., & Us, K. A. (2021). Implementasi Analisis Swot Pada Manajemen Strategik Dalam Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Muara Bungo. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 1034–1050. <https://www.dinastirev.org/JMPIS/article/view/770>
- Istiq'faroh, N. (2020). Relevansi Filosofi Ki Hajar Dewantara Sebagai Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar Di Indonesia. *Lintang Songo : Jurnal Pendidikan*, 3(2), 1–10. <https://www.journal.unusida.ac.id/index.php/jls/article/view/266>
- Made Saihu. (2020). Mangemen Berbasis madrasah, Sekolah dan Pesantren. In A. Aziz (Ed.), *Yapin An-Namiyah*. Yapin An-Namiyah.
- Maghfuri Amin. (2020). Analisis politik dan kebijakan pendidikan islam pada awal orde reformasi (1998-2004). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan*

Islam, 8(1), 14-26.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/614/924>

- Maisyana, M. (2018). Analisis Dampak Desentralisasi Pendidikan Dan Relevansi School Based Management. *Quality*, 6(2), 1. <https://doi.org/10.21043/quality.v6i2.5773>
- Manu, L., & Jusuf Blegur. (2017). Manajemen Berbasis Sekolah. In *JAL: Jusuf Aryani Learning* (Vol. 1, Nomor 1). JAL: Jusuf Aryani Learning.
- Masfufah, R., & Afriansyah, E. A. (2021). Analisis Kemampuan Literasi Matematis Siswa melalui Soal PISA. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 10(2), 291-300. <https://doi.org/10.31980/mosharafa.v10i2.825>
- Nahak, H. M. . (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65-76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Permana Octofrezi. (2020). Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I). *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 13-38. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v2i2.89>
- Saodah, Amini, Q., Rizkyah, K., Nuralviah, S., & Nurvia Urfany. (2020). Pengaruh Globalisasi Terhadap Siswa Sekolah Dasar. *Pandawa: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 2(3), 375-385. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>
- Setyawati, Y., Septiani, Q., Ningrum, R. A., & Hidayah, R. (2021). Imbas Negatif Globalisasi Terhadap Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 306-315. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1530>
- Syahrudin, & Susanto, H. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia. In Bambang Subiyakto (Ed.), *Program Studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat* (Vol. 53, Nomor 9). Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- Syahrani, A. W., Norman, Ramadan, R. S., & Rahmadani. (2022). Sistem Pendidikan Di Negara Indonesia. In *Adiba: Journal Of Education* (Vol. 2, Nomor 3).
- Wahyudi, M. A., & Lutfi, A. (2019). Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 191-201. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Yani, A., Arnilawati, R., Kunci, K., Kebijakan, A., & Guru, K. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Kinerja Guru. *Jurnal Mappesona*, 3(1).